KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Genjot Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah Tertinggal; DPR Desak Kemendes PDTT Prioritaskan Anggaran Desa
Tanggal : Minggu, 16 Juni 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Genjot Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah Tertinggal

DPR Desak Kemendes PDTT Prioritaskan Anggaran Desa

Komisi V DPR mendorong Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memprioritaskan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi pada Tahun Anggaran (TA) 2020.



Fary Djemy Francis

PASALNYA, banyak daerah tertinggal yang perlu dibangun, dan didorong untuk menjadi daerah mandiri. Agar terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis menilai, Kemendes PDTT berperan besar dalam pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Terlebih, masih banyak daerah tertinggal yang memerlukan perhatian dan dukungan untuk menopang kemajuan pembangunan.

"Sebaran penduduk juga harus terus dilakukan dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Karenanya, saya berharap, anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tahun 2020 diprioritaskan pada persoalan-persoalan tersebut," ujar Fary di sela Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR dengan Kemendes PDTT di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/6).

Fary juga menyoroti minimnya anggaran kementerian yang dipimpin Menteri Eko Putro Sandjojo itu. Menurutnya, Komisi V DPR akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai usulan pagu kebutuhan tahun 2020, karena anggaran Kemendes PDTT terus turun dari tahun ke tahun.

"Pagu awal Rp 9 triliun, turun menjadi Rp 7 triliun, kemudian menjadi Rp 6 triliun. Sekarang, turun lagi menjadi Rp 3,19 trilin. Padahal, pagu kebutuhan sebesar Rp 7,4 triliun. Hal ini akan kita perjuangkan bersama, mengingat kementerian ini penting untuk memajukan bangsa," tegas anggota Fraksi Partai Gerindra itu.

Senada, anggota Komisi V DPR Bambang Haryo Soekartono berharap, Menteri Eko Putro dapat membawa Indonesia kembali menjadi pengekspor pangan terbesar di dunia. Menurutnya, desa bisa menjadi supporting bagi Kementerian Pertanian (Kementan) dalam meningkatkan produksi pertanian.

"Saat ini, luas wilayah desa sebesar 1,2 juta hektare, permukiman untuk orang desa mencapai 800 ribu hektare, sudah tidak ada keseimbangan. Di luar negeri, desa disembunyikan, yang ditonjolkan pertanian. Akhirnya mereka berhasil meningkatkan pangan, dan masyarakat desa menjadi sejahtera. Saya harap ini bisa diterapkan di sini," jelas Bambang.

Sebelumnya, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo menyatakan, kebijakan pembangunan TA 2020 difokuskan pada sejumlah sektor. Pertama, mengentaskan 10 ribu desa tertinggal menjadi desa berkembang.

Kedua, mendorong 5 ribu desa berkembang menjadi desa mandiri. Ketiga, revitalisasi 63 kawasan transmigrasi. Keempat, revitalisasi 40 Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional (KPPN), serta mengentaskan 58 daerah tertinggal.

Lebih lanjut, Eko menuturkan, strategi yang dilakukan untuk merealisasikan sejumlah program itu. Di antaranya meningkatkan konektivitas antarwilayah pedesaan dan perkotaan, meningkatkan usaha pascapanen komoditas pertanian, peningkatan SDM pedesaan, penguatan pariwisata desa dan digitalisasi perdesaan. Untuk mewujudkan semua kebijakan itu, kata dia, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 7,4 triliun. ■ ONI